



SOAL EDARAN PENGGUNAAN DUMP TRUK Tidak Serta Merta Selesaikan Masalah TPST

BANTUL (KR) - Jumlah alat berat di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul sudah tidak seimbang dengan volume sampah masuk. Oleh karena itu, pemerintah DIY berusaha untuk membuat skema baru agar TPST Piyungan bisa dimanfaatkan untuk beberapa tahun ke depan.

Sebenarnya kalau melihat kondisi di lapangan yang kerap terjadi antrean itu pada dermaga sisi barat. Yakni lokasi untuk bongkar sampah armada swasta. Sementara paguyuban pengambil sampah swasta yang tergabung dalam Komunitas Eker-Eker Golek Menir siap menyalurkan surat edaran dari pemerintah terkait dengan penggunaan dump truk.

"Salah satu persoalan yang kami hadapi di lapangan sehingga proses bongkar muat sampah di TPST Piyungan tidak lancar karena kami keter-

batasan alat berat. Selain itu yang kerap antre itu yang armada swasta," ujar Kepala DLHK DIY, Sutarto di Bantul, Selasa (11/2).

Menurut Sutarto, ketika lokasi TPST Piyungan masih luas, tentu tidak jadi persoalan. Tetapi masalahnya lokasi semakin sempit sedang volume sampah

terus meningkat. Oleh karena itu Sutarto berpendapat mestinya armada sampah swasta mendesain seperti milik pemerintah.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



KR-Sukro Riyadi

Pemulung memilah barang bekas di area TPST Piyungan, Kabupaten Bantul.

"Kalau armada swasta kan masih manual, akan lebih baik jika dibuat dump truk agar semua lancar," ujarnya.

Sehingga kendaraan yang masuk ke TPST sudah rekomendasi. Selain itu juga sudah ada surat gubernur kepada bupati/walikota mengharuskan bahwa truk sampah itu sudah terekomendasi pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota masing-masing. Selain itu, bayaran ke pihak swasta lebih rendah dibanding dengan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih memilih ke armada swasta.

Sementara Ketua Paguyuban Pengangkut sampah swasta yang tergabung dalam wadah 'Eker Golek Menir' Sodik Marwanto mengatakan, edaran pemakaian armada dump truk sebenarnya sudah turun sekitar Maret 2019. Namun hal itu jelas tidak bisa langsung diterapkan, paguyuban menurut Sodik meminta waktu untuk melakukan persiapan.

"Sekarang kawan-kawan dalam komunitas ini kan ada yang baru kredit kendaraan, ada yang belum lunas juga kalau tiba-tiba langsung diminta untuk beralih ke dump truk jelas berat, sangat berat oleh karena itu kami minta ke-longgaran waktu," ujarnya.

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5), Rani Sjamsinarti MT di ruang kerjanya, Selasa (11/2) menjelaskan, penanganan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan menjadi salah satu prioritas bagi Pemda DIY. Pengolahan sampah di TPST Piyungan rencananya akan dilakukan menggunakan teknologi mulai 2022. Tentunya pemanfaatan teknologi di sini tidak sekadar untuk mengatasi persoalan sampah di TPST Piyungan

yang sudah overload, tapi juga ramah lingkungan.

Pemda terus mengupayakan penanganan sampah TPST Piyungan dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KP-BU). Sambil mencari teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, penutupan landfill dan pengadaan lahan pengelolaan industri sampah bakal dilakukan tahun ini," kata Rani mengungkapkan, proses kerja sama yang melibatkan swasta dimulai dari perencanaan yang sudah dimulai pada 2018 sampai 2019.

Dilanjutkan masa persiapan ada dua tahap, untuk tahap satu ada market sounding yang bertujuan untuk mencari masukan dari pemain di sektor yang akan di-KPBU. Tentunya dalam melakukan kajian itu tetap mempertimbangkan dari sisi hukum, sosial, ekonomi serta beberapa hal lainnya. Baru setelah itu dilakukan pra kualifikasi. Harapannya tahun ini (2020) atau maksimal akhir tahun bisa dilakukan tender. Harapannya pada tahun 2022 pengolahan sampah TPST Piyungan dengan memanfaatkan teknologi sudah bisa dilakukan.

Terkait kajian *feasibility study* (studi kelayakan) oleh Pemda DIY dalam skema KPBU, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta ST mengatakan ada banyak pilihan teknologi yang bisa digunakan. Misalnya teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, briket dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), pupuk organik, atau yang lainnya. Pilihan teknologi tergantung perhitungan ekonomis dari investor," ujarnya.

Namun Huda secara pribadi berharap skema KPBU itu nantinya tidak menggunakan *tipping fee*. "Kalau pe-

menang lelang mendapat *tipping fee* perton dari Pemda, kita tiap tahun harus menganggarkan ratusan miliar seperti di Surabaya atau Jakarta. Lebih baik Pemda di awal investasi berapa, tapi setelah itu tidak membebani APBD lagi," katanya.

Senyampang menunggu KPBU operasional, yang paling penting dilakukan adalah upaya memperkecil volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan. Ini dilakukan dengan menggalakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Kelompok Sampah Mandiri (KSM), seperti yang berjalan di beberapa kawasan di Sleman.

Menurut Huda, KSM yang berbasis masyarakat bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban TPST Piyungan hingga 80 persen. "Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini perlu dimatangkan konsepnya dan dikembangkan masif di DIY. Kalau di tiap desa ada satu TPS mandiri maka 80 persen masalah sampah di DIY akan selesai," ungkapnya.

Selain mengatasi masalah volume sampah, lanjut Huda, model TPS mandiri juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Satu TPS Mandiri bisa menyerap lima orang pekerja yang mengelola sampah dari 500-1.000 Kepala Keluarga (KK).

Ditambahkannya, untuk mendirikan satu TPS mandiri dibutuhkan anggaran sekitar Rp 300 juta. Pemda bisa memberikan paket pelatihan, bantuan insentif untuk beberapa bulan pertama. "Kita juga bisa menawarkan pada perusahaan-perusahaan untuk untuk membina TPS mandiri ini melalui CSR (*corporate social responsibility*), jadi tidak semua harus pakai APBD," tutur Huda.

(Roy/Ria/Ira/Bro)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005